



Raperda KLA Segera Disahkan

DPRD Dorong Kerjasama
Lintas Sektor Wujudkan
Perlindungan Anak

YOGYAKARTA, *Joglo*
Jogja - Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Yogyakarta terus
mematangkan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda)
tentang Kota Layak Anak
(KLA). Dalam tahap akhir
pembahasan sebelum menjadi
Peraturan Daerah (Perda),
legislatif menegaskan menjaga
kota layak anak merupakan
tanggung jawab lintas sektor.
DPRD Kota Yogyakarta
melalui Panitia Khusus
(Pansus) KLA telah
melaksanakan konsinyering
dengan sejumlah Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
di Pemkot Yogyakarta dan
Kementerian Hukum DIY di
The 101 Yogyakarta Tugu Hotel

pada 14-15 Agustus 2026 lalu.
Kegiatan tersebut merupakan
tahap akhir sebelum raperda
dipaparkan menjadi perda.
Ketua Pansus KLA DPRD
Kota Yogyakarta, Cahyo
Wibowo mengatakan,
pelaksanaan Perda KLA tidak
boleh hanya menjadi beban
satu instansi saja. Namun harus
dilaksanakan secara kolektif
sesuai tugas dan fungsi setiap
organisasi perangkat daerah.

Cahyo memandang, segala
aturan tentang KLA memang
harus terimplementasi dengan
baik. Dewan juga mendorong
agar pemerintah bisa membuat
profil KLA sebagai sarana
pendukung perencanaan dan
evaluasi. Profiler tersebut memuat
data terpadu mengenai anak,
capaian indikator KLA, hingga
kondisi lapangan di tingkat
kemantren dan kelurahan.

— Baca RAPERDA... Hal II



Raperda KLA Segera Disahkan

sambungan dari hal Jogja Jogja

“Rincian data terintegrasi ini penting agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakantepatsasaran,” ujar Cahyo saat dikonfirmasi, kemarin (25/8).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memastikan isu perlindungan anak sudah menjadi perhatian serius bagi legislatif. Khususnya dalam hal penanganan kekerasan, perundungan (bullying),

kejahatan jalanan, serta penyalahgunaan narkoba. Edukasi dan pendampingan berkelanjutan juga didorong agar bisa meluas pada anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Cahyo membeberkan, ada sejumlah poin menjadi atensi dewan dalam penyempurnaan Raperda KLA. Meliputi penyetaraan Indikator KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

penganggaran tiap OPD. Lalu juga menyediakan fasilitas ramah anak di tingkat kemantren dan kelurahan. Dewan mengarahkan agar Pemkot bisa menyediakan ruang bermain, Ruang Terbuka Hijau (RTH), perpustakaan, dan akses internet aman.

Ia menambahkan, jaminan hak dan perlindungan khusus bagi anak juga wajib dipastikan. Misalnya soal kepastian hak atas identitas,

dokumen kependudukan, serta kepastian hukum pada proses pengasuhan alternatif dan pengangkatan anak. Selain itu sektor swasta/dunia usaha dan elemen masyarakat juga didorong aktif dalam pemenuhan hak anak.

“Seluruh masukan tersebut akan digunakan dalam pembahasan lanjutan Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak,” tegas Cahyo. **(eri/bid/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005